

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk mencaai taraf hidup yang lebih baik, Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi sejahtera dari suatu masyarakat, kesejahteraan sosial pada umumnya meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kenaagiaan dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan sosial adalah strudi tentang lembaga-lembaga, program-program, dan kebijakan-kebijakan yang memusatkan pada pemberian pelayanan-pelayanan sosial kepada individu, kelompok, dan masyarakat. Pembahasan konsep kesejahteraan sosial, peneliti akan membahas mengenai pengertian kesejahteraan sosial, kesejahteraan keluarga, pekerjaan sosial.

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan terpenuhinya segala kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti terpenuhinya makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan sehingga konsep kesejahteraan sosial mempunyai arti yang luas. Kesejahteraan sosial juga menunjukan pada aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi

kelompok masyarakat. Adapun konsep kesejahteraan sosial menurut Friendlander dalam (Fahrudin 2014:9):

Kesejahteraan sosial adalah sistem terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Dari definisi dia atas menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan sesuatu yang telah dirancang guna memberikan atau membantu individu, kelompok dan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dalam bentuk pelayanan-pelayanan yang terorganisir dari institusi pemerintah maupun swasta berupa kesehatan, standar kehidupannya dan untuk memuhi kebutuhan sosial baik pribadi maupun kelompok dimana kebutuhan keluarga dan kebutuha masyarakat dapat terpenuhi.

Definisi kesejahteraan sosial menurut Suharto, (2010:3) adalah sebagai berikut:

Kesejahteraan Sosial adalah suatu institusi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan aktifitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh Lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemacahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu.

Dari definisi diatas bahwa kesejahteraan sosial menggambarkan suatu kondisi yang terorganisir yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta dan bertujuan untuk mencegah dan membantu mengatasi masalah sosial sehingga mendorong masyarakat menuju kualitas hidup yang baik dan mencaai fungsi sosialnya.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2012:10) sebagai berikut:” Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok dan untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya masyarakat di lingkungannya”. Terdapat tujuan utama dari kesejahteraan sosial dalam Fahrudin (2012:10) sebagai berikut:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Berdasarkan kutipan di atas tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk tercapainya standar kehidupan yang layak dengan terpenuhinya kebutuhan seperti sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan. Kebutuhan tersebut harus dipenuhi oleh setiap individu dalam terlibat langsung di dalam kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, Schneiderman (1972) dalam Fahrudin (2012:10-12) mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang samapi tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan sistem, pengawasan dan perubahan sistem.

1. Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup, kegiatan sistem kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi anggota terhadap norma-norma yang diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat dan bimbingan.

2. Pengawasan sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi: mengintensifkan fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, (re)sosialisasi, peningkatan kemampuan untuk menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperhatikan penyimpangan tingkah laku misalnya remaja dan kelompok lain dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar dapat ditingkatkan pengawasan diri sendiri (*self-control*) dengan jalan menghilangkan sebab-sebab masalah yang sesungguhnya.

3. Perubahan sistem

Mengadakan kearah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat (Effendi, 1998; Zastow, 1982). Dalam mengadakan perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial merupakan instrument untuk menyingkirkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan

keputusan; pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil; dan terhadap penggunaan struktur kesempatan tersedia secara adil pula.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan utama dari kesejahteraan sosial adalah meningkatkan taraf hidup seorang individu, kelompok, maupun masyarakat, serta untuk meningkatkan atau mengembalikan keberfungsian individu, kelompok dan masyarakat.

2.1.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial memiliki fungsi yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negative akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Friendlander dan Apte (Fahrudin,2014: 2) fungsi kesejahteraan sosial sebagai berikut:

a. Fungsi Pencegahan (*Preventive*).

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

b. Fungsi Penyembuhan (*Curative*).

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi- kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. dalam fungsi ini juga tercakup dengan fungsi pemulihan atau rehabilitasi.

c. Fungsi Pengembangan (*Development*).

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat

d. Fungsi Penunjang (*Supportive*).

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosial yang lain.

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut untuk memepkuat agar terhidar dari masalah-masalah sosial yang menghampiri setiap individu, kelompok, dan masyarakat. Fungsi kesejahteraan sosial dilakukan agar orang tersebut daoat berfungsi kembali dan berguna bagi individu, kelompok dan masyarakat dan dapat memberikan sumbagangan dalam proses pembangunan dan sumber daya sosial dalam masyarakat dan membantu mereka mencapai tujuan mereka melalui pelayanan kesejahteraan sosial yang ada.

2.1.4 Komponen Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf kehidupan ke yang lebih baik, oleh karenanya kesejahteraan sosial dapat diupayakan melalui pelayanan sosial atau dalam bentuk kegiatan. Semua kegiatan terkait usaha

kesejahteraan sosial memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan kegiatan-kegiatan lain, seperti berikut ini yang dikemukakan oleh Fahrudin (2012:16-17):

1. Organisasi formal: Usaha kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi atau badan sosial yang formal pula. Kegiatan yang dilaksanakan memperoleh pengakuan masyarakat karena memberikan pelayanan secara teratur, dan pelayanan yang diberikan merupakan fungsi utamanya.
2. Pendanaan: Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab masyarakat. Mobilisasi dana dan sumber (*funds raising*) merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan kesejahteraan sosial karenanya tidak mengejar keuntungan semata-mata.
3. Tuntutan kebutuhan manusia: kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja, hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan yang lainnya. Pelayanan kesejahteraan sosial diadakan karena tuntutan kebutuhan manusia.
4. Profesionalisme: Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara profesional berdasarkan kaidah ilmiah, terstruktur, sistematis dan menggunakan metoda dan Teknik-teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya.

5. Kebijakan/ perangkat hukum/ perundang-undangan: pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat perundang-undangan yang mengatur syarat memperoleh proses pelayanan dan pengakhiran pelayanan.
6. Peran serta masyarakat: Usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peran serta masyarakat agar dapat berhasil dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
7. Data dan informasi kesejahteraan sosial: pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa data dan informasi yang tepat maka pelayanan akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

Berdasarkan penjelasan mengenai komponen-komponen kesejahteraan sosial tersebut, dapat dilihat bahwa komponen-komponen kesejahteraan sosial dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan positif yang melibatkan berbagai pihak guna mendukung kegiatan-kegiatan tersebut terkait usaha kesejahteraan sosial

2.1.5 Pendekatan Kesejahteraan Sosial

Pendekatan kesejahteraan merupakan hal yang penting untuk menunjang aktivitas keilmuan dan praktik kesejahteraan sosial. Menurut Midgley dalam Fahrudin (2014:51) pendekatan-pendekatan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

1. Filantropi sosial

Filantropi terkait erat dengan upaya-upaya kesejahteraan sosial yang dilakukan para agamawan dan relawan, yakni upaya yang bersifat amal (*charity*) dimana orang-

orang ini menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. pelaku dari filantropi ini disebut dengan filantropis

2. Pekerjaan sosial

Berbeda dengan pendekatan yang sebelumnya yaitu filantropi pekerjaan sosial disini merupakan pendekatan yang teroganisir untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menggunakan tenaga professional yang memenuhi syarat untuk menangani masalah sosial. Perkembangan pekerjaan sosial sendiri juga tidak lepas dari adanya filantropi. Pada abad ke-19 pekerjaan sosial telah mengalami pengembangan professional dan akademik yang cukup pesat dan telah menyebar di seluruh dunia.

3. Administrasi sosial

Pendekatan administrasi sosial berusaha mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menciptakan berbagai macam program guna meningkatkan kesejahteraan warga negaranya, biasanya dengan penyediaan pelayanan sosial. Pendekatan ini dilakukan oleh pemerintah.

4. Pembangunan sosial

Pembangunan sosial merupakan suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara utuh, di mana pembangunan ini dilakukan untuk melengkapi dinamika proses pembangunan ekonomi.

2.1.6 Bidang-Bidang Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dalam melakukan pelayanannya dapat melalui bidangnya yang seusia dan terarah. Secara *substantive* bidang kesejahteraan sosial atau pelayanan sosial juga disebut sebagai praktik pekerjaan sosial, terdiri dari berbagai cakupan yang saling terkait erat satu sama lain. Menurut Fahrudin (2014:17) terdapat berbagai bidang kesejahteraan, antara lain:

1. Kesejahteraan anak dan keluarga
2. Kesejahteraan remaja dan generasi muda
3. Kesejahteraan orang lanjut usia
4. Pelayanan kesejahteraan umum (*Public social welfare service*)
5. Pelayanan rekseasional
6. Pelayanan sosial koreksional
7. Pelayanan kesehatan mental
8. Pelayanan sosial medis
9. Pelayanan sosial bagi wanita
10. Pelayanan sosial bagi penyandang cacat
11. Pelayanan sosial perumahan dan lingkungan

Penjelasan mengenai bidang-bidang kesejahteraan sosial diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian proses pertolongannya, pekerja sosial telah memiliki bidangnya masing-masing atau spesifikasi yang telah sesuai dengan keahlian dan konsentrasi keilmuan mereka, sehingga dapat lebih mudah memfokuskan pada bidang yang sesuai.

2.1.7 Usaha Kesejahteraan Sosial

Usaha kesejahteraan sosial atau *social welfare services* pada umumnya hanya disebut sebagai pelayanan sosial. Cassidy seperti dikutip oleh Friendlender (1980) dalam Fahrudin (2014:15) yang mengatakan sebagai kegiatan-kegiatan terorganisasi yang terutama dan secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan dan penyempurnaan sumber-sumber manusia dan kegiatan ini meliputi usaha-usaha asistensi sosial, asuransi sosial, kesejahteraan anak, pencegahan kriminalitas, kesehatan mental, kesehatan masyarakat dan lain-lain. Menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 dalam Fahrudin (2014:15) menyatakan:

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Dari penjelasan tersebut bahwa usaha kesejahteraan sosial adalah pada dasarnya merupakan suatu system yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat, yang dimana bentuknya berupa pelayanan sosial untuk mencukupi kebutuhan dasar masyarakat agar bisa hidup dengan layak, meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial ini hasil dari kebijakan sosial dengan tujuan menyelesaikan permasalahan sosial.

Usaha kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Peningkatan kualitas hidup manusia merupakan kewajiban pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan manusia dalam menjalani hidupnya, salah

satunya melalui pelayanan-pelayanan yang disediakan. Tujuan usaha kesejahteraan sosial menurut Suharto (2014:14) yaitu:

1. Peningkatan standar hidup, dimana meningkatkan standar hidup melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial untuk kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung atau masyarakat yang sangat rentan yang memerlukan perlindungan.
2. Peningkatan keberdayaan, dimana keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menunjang tinggi harga diri dan martabat manusia.
3. Penyempurnaan kebebasan, dimana kebebasan melalui perlunasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi kemampuan dan standar kemanusiaan.

Tujuan usaha kesejahteraan sosial pada dasarnya untuk meningkatkan standar hidup masyarakat, peningkatan keberdayaan masyarakat, dan penyempurnaan kebebasan. Meningkatkan standar hidup masyarakat ini di dorong melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial, peningkatan keberdayaan ini melalui penetapan sistem kelembagaan yang menunjang tinggi harga diri manusia, sedangkan penyempurnaan kebebasan ini melalui memilih kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

2.2 Konsep Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi dimana dalam pelaksanaannya membantu untuk mengembalikan keberfungsian sosial seseorang melalui berbagai pendekatan. Pekerjaan sosial merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial dan ahli lainnya dalam upaya meningkatkan keberfungsian sosial. Pekerjaan sosial menurut Zastrow dikutip oleh Surahto (2011:32) adalah:

Pekerjaan sosial adalah aktivitas professional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Dari definisi tersebut bahwa praktik pekerjaan sosial yang dilakukan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh ahli pekerja sosial, tujuan dari pekerjaan sosial yaitu berfokus pada keberfungsian sosial individu, kelompok dan masyarakat agar terciptanya suatu kondisi yang sejahtera. Sejahtera yang dimaksud yaitu terpenuhinya kebutuhan hidupnya serta dapat melakukan peran sosialnya sebagaimana semestinya.

Tujuan utama dari praktik pekerjaan sosial yaitu untuk mengembalikan keberfungsian sosial. Ketika berfungsi sosialnya maka mereka dapat melakukan sesuatu hal untuk mengupayakan kehidupannya dengan memenuhi kebutuhan dan mencapai kehidupan yang lebih baik. keberfungsian sosial menurut Suharto (2014:28) yaitu: “Kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok atau masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial dalam memenuhi atau merespon kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, serta menghadapi goncangan dan tekanan)”.

Dari definisi tersebut menjelaskan bahwa seseorang harus mampu kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan serta menjalankan peranan sosial sebagai mestinya dan bisa menghadapi goncangan dan tekanan yang timbul di dalam masyarakat.

2.2.1 Fokus pekerjaan Sosial

Fokus pekerjaan sosial adalah untuk mengembalikan keberfungsian sosial, maka merujuk pada praktik pekerjaan sosial memiliki tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW yang dikutip oleh Fahrudin (2012:66) adalah

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (coping), perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

Penjelasan tersebut menyatakan bahwa profesi pekerjaan sosial berusaha meningkatkan kesejahteraan sosial individu, kelompok ataupun masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam praktik pekerjaan sosial untuk meningkatkan kemampuan, mengatasi masalah hingga menghubungkan kepada sumber dan pelayanan-pelayanan sosial, dan memperbaiki kebijakan sosial yang ada.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial memiliki prinsip-prinsip dikarenakan pekerjaan sosial sebagai proses yang tentunya professional. Menurut Mans dalam Fahrudin (2014:16-19), ada enam prinsip dasar dalam praktek pekerjaan sosial yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan

Prinsip ini mengemukakan tentang pekerja sosial yang menerima klien tanpa "menghakimi" klien tersebut sebelum, pekerja sosial untuk menerima klien dengan sewajarnya (apa adanya) akan lebih membantu pengembangan relasi antara pekerja sosial dengan kliennya. Dengan adanya sikap menerima (menerima keadaan klien apa adanya) maka klien akan dapat lebih percaya diri dan dengan demikian ia (klien) dapat mengungkapkan berbagai macam perasaan dan kesulitan yang mengganjal di dalam pembicaraan

2. Komunikasi

Prinsip komunikasi ini dengan mudah dapat mendukung. Untuk komunikasi dengan klien, baik dalam bentuk komunikasi yang verbal, yang meminta klien melalui sistem klien, maupun bentuk komunikasi nonverbal, seperti cara membuka klien, memilih cara duduk, duduk dalam suatu pertemuan dengan anggota keluarga yang lain.

3. Individualisasi

Prinsip individualisasi pada intinya mempertimbangkan setiap individu yang berbeda satu sama lain, sehingga seorang pekerja sosial haruslah mengatur cara memberi kliennya, guna mendapatkan hasil yang diinginkan.

4. Partisipasi

Berdasarkan prinsip ini, seorang pekerja sosial harus meminta kliennya untuk mendorong aktif dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapinya, sehingga klien dapat menggunakan sistem klien yang juga menyediakan rasa bantuan untuk bantuan tersebut. Karena tanpa ada kerja sama dan peran serta klien maka upaya bantuan sulit untuk mendapatkan hasil yang optimal.

5. Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan ini akan memungkinkan klien atau sistem klien mengungkapkan apa yang sedang ia rasakan dan bahaya ia hadapi dengan rasa aman, karena ia yakin apa yang ia utarakan dalam hubungan kerja dengan pekerja sosial akan tetap dijaga (dirahasiakan) oleh pekerja sosial agar tidak diketahui oleh orang lain (mereka yang tidak berkepentingan).

6. Kesadaran diri pekerja sosial.

Prinsip kesadaran diri ini menuntut pekerja sosial untuk menjalin relasi profesional dengan menjalin relasi dengan kliennya, dalam arti pekerja sosial yang mampu menggerakkan benar-benar terhanyut oleh perasaan atau bantuan yang disampaikan oleh kliennya tidak "kaku" dalam percakapan dengan pekerja sosial, yang pesan informasi atau cara bicara, cara berbicara, dan lain-lain, bantuan dengan setiap tanggung jawab terhadap keberhasilan proses.

2.2.3 Peran-peran Pekerjaan Sosial

Dalam menjalankan pekerjaannya, pekerja sosial melakukan beberapa peranan baik pada level individu, keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakat. Beberapa peranan pekerja sosial menurut Zastrow yang dikutip Huraerah (2008: 149) yaitu: “*Enabler, Broker, Expert, Social Planner, Advocate, dan The Activist*”. *Enabler* merupakan peranan pekerja sosial yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, komunitas atau masyarakat agar dapat mengartikulasikan atau mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan mereka, menjalskan dan mengidentifikasi masalah-masalah mereka, dan mengembangkan kemampuan mereka agar dapat menangani masalah yang dialaminya dengan lebih efektif.

Broker merupakan peranan pekerja sosial yang bertujuan untuk menghubungkan individu, kelompok, komunitas atau masyarakat ke sistem sumber yang ada di lingkungannya. Sistem sumber merupakan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan yang sedang dialami. Seringkali mereka tidak bisa mengakses sistem sumber tersebut, maka dari itu tugas pekerja sosial adalah untuk membantu mereka dalam memperolehnya.

Expert merupakan peranan pekerjaan sosial yang bertujuan untuk menyediakan informasi dan memberikan saran-saran dalam berbagai area. Pekerjaan sosial memberikan saran-saran dalam berbagai area. Pekerja sosial memberikan masukan-masukan yang membangun dalam upaya untuk mencapai kondisi sejahtera. Biasanya peranan ini dilakukan ketika pekerja sosial sudah menjadi ahli, lalu mereka akan

memberikan masukan-masukan terhadap praktik pekerjaan sosial dan kebijakan sosial yang akan dibuat.

Social Planner merupakan peranan pekerja sosial yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang masalah sosial yang terjadi dan menganalisis fakta tersebut serta menyusun alternative tindakan apa yang akan dilakukan dalam upaya untuk mengatasinya.

Advocate merupakan peranan pekerja sosial yang bertujuan untuk melakukan advokasi yakni mewakili atau menjadi representasi dari kelompok yang membutuhkan pertolongan ataupun pelayanan, tetapi institusi yang seharusnya memberikan pertolongan atau pelayanan tersebut tidak melakukan hal tersebut atau bahkan menolak tuntutan yang diajukan oleh suatu kelompok.

Activist merupakan peranan pekerja sosial yang bertujuan untuk merangsang kelompok-kelompok yang tidak beruntung untuk melakukan tindakan melawan struktur kekuasaan yang ada dan menjadi kelompok penekan bagi mereka. Pekerja sosial harus mendorong kelompok-kelompok tertindas tersebut untuk menekan kelompok yang telah menindasnya.

Penjelasan diatas mengemukakan bahwa terdapat beberapa peran seorang pekerja sosial harus lakukan dalam menjalankan praktiknya sebagai pekerja sosial. Selain itu, praktik pekerjaan sosial dilakukan dalam berbagai aspek pelayanan sosial dalam memberikan pelayanan sosial itu seperti memberikan pemberdayaan, pemberian dan bimbingan kepada klien baik itu dalam lingkup perorangan atau dalam lingkup kelembagaan.

2.2.4 Metode Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial sebagai profesi yang bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial individu, kelompok dan masyarakat, dalam hal ini tentu mempunyai metode dalam melakukan pertolongan, dalam menjalankan proses pertolongan pekerjaan sosial menggunakan beberapa metode yaitu case work, groupwork, dan community organization/community development. Metode-metode tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Metode pekerjaan sosial casework

Casework merupakan salah satu metode pekerjaan sosial yang telah dikembangkan oleh pekerjaan sosial dalam berbagai bidang pelayanan sosial. Menurut Rex A skidmore (1976) dalam Sundayani (2015:5) Casework adalah “Proses untuk membantu individu-individu dalam mencapai penyesuaian satu sama lain serta penyesuaian antara individu dengan lingkungan sosialnya.” Casework merupakan metode yang terorganisir dengan baik untuk membantu individu agar mampu menolong dirinya serta ditujukan untuk memperbaiki dan memperkuat keberfungsian sosial sehingga pekerja sosial harus mampu menggali informasi tentang permasalahan klien dengan pendekatan individu dan memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh individu tersebut.

2. Metode Pekerjaan Sosial Groupwork

Groupwork merupakan salah satu metode dalam praktek pekerjaan sosial. Metode ini menggunakan kelompok untuk memecahkan permasalahan klien. Menurut Gisela Konopka (1972) dalam Sundayani (2015:21) Social Grouowrok yaitu: “Metode dalam

pekerjaan sosial yang bertujuan untuk membantu keberfungsian individu dalam kelompok. Merupakan suatu pendekatan yang secara sadar diarahkan untuk mengembangkan kemampuan individu semaksimal mungkin dengan suatu kelompok.” Groupwork merupakan metode yang bertujuan untuk membantu individu dalam mengembalikan keberfungsian sosialnya di dalam kelompok melalui perbaikan, pencegahan, pertumbuhan sosial secara normal, peningkatan kemampuan pribadi dan partisipasi sebagai warga masyarakat.

3. Metode Pekerjaan Sosial (Community Organization/Development)

Metode Pekerjaan Sosial CP/CD merupakan salah satu metode yang dilakukan oleh pekerja sosial dimana dilama prosesnya bertujuan untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan diri mereka sendiri melalui aktivitas-aktivitas atau program yang kolektif. Menurut Johnson (1984) dalam Sundayani (2015:35) Community Work (Pengembangan masyarakat) sebagai berikut: “Community Work merupakan metode yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses yang mempengaruhinya.” Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa metode pekerjaan sosial CO/CD merupakan kegiatan dalam membantu masyarakat dalam meningkatkan diri mereka sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber yang sudah ada.

2.2.5 Tahapan-Tahapan Intervensi Pekerjaan Sosial

Dalam pelaksanaannya pekerjaan sosial akan melalui beberapa tahapan, tahapan tersebut yaitu tahapan intervensi pekerjaan sosial. Siporin dalam Iskandar (2013:65) menyatakan terdapat 6 tahapan intervensi pekerjaan sosial yaitu sebagai berikut:

a. Tahap *engagement, intake* dan *contract*

Tahap ini adalah tahap permulaan pekerja sosial bertemu dengan klien. Dalam proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan klien, pelayanan apa yang akan diberikan oleh pekerja sosial dan lembaga sosial dalam membantu memenuhi kebutuhan klien atau memecahkan masalah klien. Kontrak diartikan sebagai suatu kesepakatan antara pekerja sosial dengan klien yang di dalamnya dirumuskan hakekat permasalahan klien, tujuan- tujuan pertolongan yang hendak dicapai, peranan-peranan dan harapan- harapan pekerja sosial dan klien, metode – metode pertolongan yang akan digunakan serta pengaturan- pengaturan lainnya.

b. Tahap *Assessment*

Assessment merupakan proses pengungkapan dan pemahaman masalah klien, yang meliputi: bentuk masalah, ciri- ciri masalah, ruang lingkup masalah, faktor- faktor penyebab masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya pemecahan masalah yang terdahulu yang pernah dilakukan klien, kondisi keberfungsian klien saat ini dan berdasarkan hal itu semua maka dapat ditentukan fokus atau akar masalah klien

c. Tahap Membuat Perencanaan Intervensi

Rencana intervensi merupakan proses rasional yang disusun dan dirumuskan oleh pekerja sosial yang meliputi kegiatan- kegiatan apa yang dilakukan untuk memecahkan masalah klien, apa tujuan pemecahan masalah tersebut.

d. Tahap Melaksanakan Program Berdasarkan Rencana Intervensi

Pekerja sosial mulai melaksanakan program kegiatan pemecahan masalah klien. Dalam pemecahan masalah ini hendaknya pekerja sosial melibatkan klien secara aktif pada setiap kegiatan.

e. Tahap Evaluasi

pada tahap ini pekerja sosial harus mengevaluasi kembali semua kegiatan pertolongan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilannya, kegagalannya atau hambatan yang terjadi. Ada dua aspek yang harus dievaluasi oleh pekerja sosial yaitu tujuan hasil dan tujuan proses

f. Tahap Terminasi

Tahap terminasi dilakukan bilamana tujuan pertolongan telah dicapai atau bilamana terjadi kegiatan referral atau bilamana karena alasan- alasan yang rasional klien meminta pengakhiran pertolongan atau karena adanya faktor- faktor eksternal yang dihadapi pekerja sosial atau karena klien lebih baik dialihkan ke lembaga- lembaga atau tenaga ahli lainnya yang lebih berkompeten. Pembagian kerja yang jelas akan mempermudah pelaksanaan pelayanan sosial sampai pada tujuan yang diharapkan.

Dari penjelasan tahapan-tahapan intervensi pekerjaan sosial di atas merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan di pahami oleh seorang pekerja sosial,

tahapan-tahapan ini bisa diterapkan pada permasalahan individu, kelompok dan masyarakat.

2.3 Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara sistematis sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mewujudkan keberfungsian sosial setiap individu, sehingga setiap orang dapat menciptakan kondisi hidup yang sejahtera. Pelayanan sosial menurut Romanyshyn yang dikutip oleh Fahrudin (2012:51) menyatakan bahwa:

Pelayanan sosial sebagai usaha-usaha untuk mengembalikan, mempertahankan dan meningkatkan keberfungsian individu-individu dan keluarga-keluarga melalui (1) sumber-sumber sosial pendukung, dan (2) proses-proses yang meningkatkan kemampuan individu-individu dan keluarga-keluarga untuk mengatasi stress dan tuntutan-tuntutan kehidupan sosial yang normal.

Dari definisi tersebut bahwa pelayanan sosial termasuk dalam kategori pelayanan yang merujuk pada individu dan keluarga. Untuk membantu meningkatkan kemampuan individu dan keluarga supaya tercapai kondisi sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan, pelayanan sosial dibutuhkan oleh setiap masyarakat dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan. Pelayanan sosial harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Sedangkan menurut Sainsbury dalam Fahrudin (2014:50) menyatakan bahwa:

Dalam arti yang luas, pelayanan-pelayanan sosial adalah pelayanan yang digunakan untuk semua (communal service) yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan mengurangi jenis-jenis masalah-masalah yang memerlukan penerimaan public secara umum atas tanggung jawab sosial dan yang tergantung pada pengorganisasian hubungan-hubungan sosial

untuk pemecahannya, pelayanan sosial secara luas ini menurut Sainsbury, meliputi kesehatan, Pendidikan, pemeliharaan, penghasilan, perumahan dan pelayanan personal.

Dari definisi tersebut bahwa secara keseluruhan menjelaskan bahwa pelayanan sosial berlaku untuk semua orang dan dilihat secara luas aspek pelayanan yang diperlukan. Tujuannya dari pelayanan sosial agar tercapainya seluruh kebutuhan-kebutuhan setiap orang dan mengurangiserta mengatasi masalah-masalah sosial setiap orang, agar perannya di dalam masyarakat dapat diterima dan berfungsi kembali, kemudian Khan dalam Fahrudin (2012:55) menyatakan beberapa fungsi pelayanan sosial personal yaitu:

(1) Pelayanan-pelayanan untuk sosialisasi dan pengembangan (2) Pelayanan-pelayanan untuk terapi, pertolongan dan rehabilitasi, perlindungan sosial dan petawatan pengganti (3) Pelayanan-pelayanan untuk mendapatkan akses, informasi dan nasihat.

Pelayanan sosial yang berfokus pada setting mikro atau individu ini mempunyai beberapa fungsi yaitu sosialisasi dan pengembangan, pelayanan untuk terapi kepada individu yang memerlukan penyelesaian masalah melalui terapi, rehabilitasi dan perlindungan sosial, dan juga pelayanan untuk akses informasi maupun nasihat.

2.4 Tinjauan Tentang Partisipasi

2.4.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi secara umum digambarkan sebagai suatu sumbangan dari individu ataupun masyarakat terhadap suatu kegiatan baik dilakukan sebelum kegiatan dalam bentuk pemikiran dan perencanaan, lalu dalam pelaksanaan dalam bentuk tenaga, biaya dan lain-lain. Menurut Mubyarto (1997) dalam Huraerah (2008:96) menyatakan

pengertian dasar partisipasi adalah tindakan mengambil bagian dalam kegiatan. Sementara itu, Menurut ulaiman (1985:6) dalam Huraerah (2008:96) seorang ahli pekerjaan sosial, mengungkapkan partisipasi sosial sebagai keterlibatan aktif warga secara perorangan, kelompok atau dalam kesatuan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program serta usaha pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial di dalam dan di luar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran tanggung jawab sosial. Menurut Ndraha (1987:1) dalam Huraerah (2008:96) menyimpulkan partisipasi masyarakat meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Partisipasi dalam melalui kontak dengan pihak lain (contact change) sebagai satu di antara titik awal perubahan sosial
- b. Partisipasi dalam memperhatikan/ menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (menaati, menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya).
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana)
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan
- e. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan (participation in benefit)
- f. Partisipasi dalam menilai hasil pembangunan

Dari definisi tersebut partisipasi masyarakat bukan hanya dalam pelaksanaan saja seperti halnya ditafsirkan masyarakat pada umumnya, tetapi meliputi kegiatan

pengambilan keputusan, penyusunan program, perencanaan program, pelaksanaan, mengembangkan program dan menikmati hasil dari pelaksanaan program tersebut.

2.4.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi merupakan sumbangan yang diberikan seseorang, kelompok atau masyarakat yang berpartisipasi, menurut Hamijoyo dan Iskandar, yang dikutip Pasaribu dan Simanjuntak (1986:349) dalam Huraerah (2008:102) menjelaskan jenis-jenis partisipasi sebagai berikut:

- a. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipasi dalam anjang sono, pertemuan atau rapat.
- b. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipasi dalam berbagai kegiatan untuk memperbaiki atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
- c. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
- d. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industry.
- e. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya turut arisan, koperasi layad (dalam peristiwa kematian), kondangan (dalam peristiwa pernikahan), nyam-bungan, mulang sambung.

Sedangkan menurut Sulaiman (1985:23) dalam Huraerah membagi bentuk-bentuk partisipasi sosial ke dalam lima macam yaitu:

- a. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka
- b. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana, dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri. Kalaupun terpaksa diperlukan dari luar, hanya bersifat sementara dan sebagai umpan.
- c. Partisipasi dalam bentuk dukungan
- d. Partisipasi dalam proses pengambilan dukungan
- e. Partisipasi representative dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Dengan melihat kedua pendapat tersebut mengenai bentuk-bentuk partisipasi, maksud dari partisipasi adalah untuk menunjukkan luasnya kemungkinan-kemungkinan yang dapat digunakan orang jika akan berpartisipasi. Dengan kata lain, untuk berpartisipasi sumbangan orang hendaknya jangan hanya dilihat dari jumlah tenaga dan harta benda yang diberikan, karena jika berpartisipasi dibatasi pada sumbangan tenaga kerja dan harta benda saja berarti mereduksi esensi konsep dasar partisipasi tersebut.

2.4.3 Lingkup Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk, terdapat berbagai macam bentuk atau lingkup dalam partisipasi seperti yang dikemukakan oleh Yadav (Theresia dkk, 2014 : 198-1999) yang menjelaskan bahwa terdapat empat macam

kegiatan yang menunjukkan partisipasi dalam masyarakat, kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi masyarakat perlu ditumbuhkan melalui adanya forum yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan di wilayah setempat atau di tingkat lokal masyarakat.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai partisipasi masyarakat untuk suka rela menyumbangkan tenaganya.

3. Partisipasi dalam pemantauan evaluasi

Kegiatan emantauan dan evaluasi sangat diperlukan. Dalam hal ini partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan yang sedang dijalankan oleh masyarakat setempat.

4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan, merupakan unsur penting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemertaan pemerataan hasil kegiatan dapat terlaksanakan yang merupakan tujuan utama.

Kegiatan yang menggambarkan partisipasi masyarakat diantaranya yaitu masyarakat ikut dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, maka partisipasi masyarakat bukan hanya dalam pelaksanaan kegiatan saja tetapi juga dalam

pengambilan keputusan dan pemantauan hasil kegiatan untuk dimanfaatkan kembali oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungannya.

2.4.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Terkait dengan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjalankan program-program terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keterlibatan mereka baik yang mendukung maupun yang menghambat. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Menurut Ife (2008:20) mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, antara lain :

1. Penghargaan

Segala bentuk partisipasi harus diakui serta dihargai ini karena akan semakin membuat masyarakat untuk terdorong dalam partisipasi.

2. Dukungan struktur masyarakat

Di dalam proses struktur masyarakat di lingkungan tersebut tidak mengucilkan setiap orang yang turut berpartisipasi. Lingkungan masyarakat tersebut harus mendukung kelemahan yang mungkin ada di dalam diri setiap warganya, seperti ketidakpercayaan diri, lemah dalam berpikrit atau berkata-kata.

3. Dukungan sarana

Seseorang dalam berpartisipasi harus juga didukung dalam partisipasinya seperti ada sarana transportasi, kemudian memudahkan untuk mengakses lokal atau tempat kegiatan harus diperhitungkan, begitu pula dengan waktu pelaksanaan kegiatannya.

4. Kebutuhan masyarakat

Seseorang akan berpartisipasi apabila mereka merasakan isu atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan hal yang penting, masyarakat akan merasa isu tersebut penting ketika sesuai dengan kebutuhan yang dirasakannya.

5. Keluarga

Keluarga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi khususnya perempuan, tidak mengherankan bila keikutsertaan perempuan dalam suatu kegiatan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari keluarganya sehingga keluarga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi.

6. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan salah satu unsur penting dalam partisipasi, dari pengetahuan yang dimiliki maka akan menumbuhkan kesadaran dan pada akhirnya akan terwujud dalam perubahan sikap dan tingkah laku.

7. Kebermanfaatan program

Semakin banyak manfaat program yang akan diperoleh suatu pihak dari pihak lain melalui kegiatan tertentu, maka keterlibatan mereka dalam kegiatan tersebut juga semakin besar.

Partisipasi yang terdapat dalam setiap orang tentunya terjadi dikarenakan adanya suatu persepsi atau pemikiran yang ada dalam dirinya, selain itu terdapat juga faktor-faktor dalam partisipasi. Menurut Sahidu (1998) dalam Fahrudin (2014:44) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi adalah :

1. Motif harapan

2. *Needs*
3. *Rewards*, dan
4. Penguasaan informasi

Faktor yang memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi adalah :

1. Pengaturan dan pelayanan
2. Kelembagaan
3. Struktur dan stratifikasi sosial
4. Budaya lokal
5. Kepemimpinan
6. Sarana dan prasarana

Sedangkan untuk faktor yang mendorongnya adalah :

1. Pendidikan modal, dan
2. Pengalaman yang dimiliki

Berdasarkan faktor-faktor partisipasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa faktor tersebut terjadi karena adanya keinginan dari setiap orang untuk berubah dan menghasilkan tujuan yang diinginkan, selain itu faktor tuntutan juga merupakan suatu hal yang menyebabkan seseorang untuk dapat berpartisipasi dan juga didukung oleh adanya *rewards* yang akan di dapatkan.

2.5 Tinjauan tentang Program Posyandu Balita

2.5.1 Pengertian Posyandu

Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan di suatu wilayah kerja puskesmas, dimana program ini dapat dilaksanakan di balai dusun, balai kelurahan, maupun tempat-tempat lain yang mudah di datangi oleh masyarakat. Posyandu merupakan pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana. Kegiatan posyandu merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan mereka. Pengertian posyandu menurut Depkes (2012:1) mengungkapkan bahwa: “Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan dasar.”

Berdasarkan pengertian tersebut posyandu merupakan wadah yang berbasis masyarakat untuk menghimpun seluruh kekuatan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakan, memberikan setya memperoleh informasi pelayanan sesuai kebutuhan. Posyandu diselenggarakan terutama untuk melayani balita baik imunisasi maupun penimbangan berat badan. Tujuan diadakannya kegiatan posyandu balita untuk menunjang percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi melalui perbedayaan masyarakat.

2.5.2 Tujuan Penyelenggaraan Posyandu

Posyandu merupakan kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dimana di dalam pelaksanaannya posyandu mempunyai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Ismawati (2010:4) tujuan penyelenggaraan posyandu yaitu:

- a. Menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu hamil (ibu hamil, melahirkan dan nifas), angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) masih cukup tinggi, meskipun dari tahun ketahun sudah dapat diturunkan
- b. Membudayakan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera)
- c. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan keluarga berencana (KB) serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
- d. Berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera.
- e. Menghimpun potensi masyarakat untuk berperan serta secara aktif meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu, bayi, balita dan keluarga serta mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita.

2.5.2 Manfaat Posyandu

Dalam pelaksanaan posyandu terutama untuk balita, baik imunisasi maupun penimbangan berat badan mempunyai manfaatnya bagi masyarakat. Menurut Ismawati (2010:4) manfaat posyandu yaitu:

a. Bagi masyarakat

Manfaat posyandu bagi masyarakat adalah memperoleh kemudahan mendapatkan informasi dan pelayanan bagi anak balita dan ibu, pertumbuhan anak balita terpantau sehingga tidak menderita gizi buruk. Bayi dan anak mendapatkan kapsul vitamin A, bayi memperoleh imunisasi lengkap, memperoleh penyuluhan kesehatan yang berkaitan tentang kesehatan ibu dan anak.

b. Bagi kader

Mendapatkan berbagai informasi kesehatan lebih dahulu dan lebih lengkap, ikut berperan secara nyata dalam tumbuh kembang anak balita dan kesehatan ibu, citra diri meningkat di mata masyarakat sebagai orang yang terpercaya dalam bidang kesehatan menjadi panutan karena telah mengabdikan pertumbuhan anak dan kesehatan ibu (WHO,2003)

2.5.3 Penyelenggaraan Posyandu

Penyelenggaraan kegiatan di posyandu dikenal dengan nama “sistem 5 meja”, dimana kegiatan masing-masing meja mempunyai kegiatan khusus. Sistem 5 meja tersebut tidak berarti bahwa posyandu harus memiliki 5 buah meja untuk pelaksanaannya, tetapi posyandu harus mencakup 5 pokok kegiatan yaitu:

a. Meja 1 pendaftaran balita, ibu hamil dan ibu menyusui

Pada meja 1 kader bertugas menerima anak yang datang, apabila belum memiliki KMS, dibuatkan KMS baru dan lengkap. Bagi semua anak yang datang namanya ditulis dan kemudian diselipkan di KMS, kemudian menunggu untuk ditimbang pada meja 2.

b. Meja 2 penimbangan balita

Pada meja 2 kader melakukan penimbangan anak dan mencatat berat badan anak. Kader yang bertugas di meja penimbangan diusahakan tetap, agar kesalahan bisa ditekan sekecil mungkin.

c. Meja 3 pencatatan hasil penimbangan

Pada meja 3 kader bertugas untuk membubuhkan titik pada KMS anak sesuai dengan berat badan anak pada bulan tersebut. Setelah itu menghubungkan titik tersebut dengan 2 titik dari 2 bulan yang berurutan, apabila titik tidak berurutan dikarenakan anak tidak hadir pada salah satu penimbangan maka tidak dihubungkan.

d. Meja 4 penyuluhan dan pelayanan gizi bagi ibu balita, ibu hamil dan ibu menyusui

Pada meja 4 kader bertugas memberikan penyuluhan kepada ibu sesuai hasil penimbangan anak pada bulan tersebut. Pada meja ini merupakan meja terpenting dikarenakan tanpa adanya kegiatan penyuluhan dan pelayanan yang baik, program penimbangan tidak akan membawa manfaat.

e. Meja 5 pelayanan kesehatan, KB, imunisasi dan pojok oralit

Pada meja 5 pemberian pelayanan kesehatan berupa KB, imunisasi, pemberian tablet tambah darah (tablet besi), vitamin A dan obat-obatan lainnya kepada anak atau ibu hamil di wilayah kerja yang datang.

Penyelenggaraan posyandu di laksanakan untuk memeberikan pelayanan kesehatan yang diselenggrakan oleh anggota masyarakat yang telah dilatih menjadi kader. Posyandu dibawah bimbingan puskesmas, sedangkan pengelola dari kegiatan posyandu adalah pengurus yang dibentuk oleh ketua RW yang berasal dari kader, tokoh masyarakat formal dan informal. Kader adalah seorang tenaga sukarela yang direkrut dari, oleh dan untuk masyarakat yang bertugas untuk membantu kelancaran pelayanan kesehatan. Keberadaan kader dibentuk sesuai dengan keperluan untuk menggerakan partisipasi masyarakat khususnya partisipasi ibu balita.

2.5.4 Kegiatan Posyandu Balita

Posyandu merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh, dari dan untuk masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya kesehatan pada anak balita, posyandu merupakan bagian dari pembangunan untuk mencapai keluarga kecil bahagia dan sejahtera, dilaksanakan oleh keluarga bersama dengan masyarakat dibawah bimbingan kesehatan dari puskesmas setempat Kegiatan dalam posyandu balita adalah sebagai berikut:

1. Penimbangan balita

Penimbangan anak dan mencatat berat badan anak. Penimbangan merupakan langkah awal dalam memantau pertumbuhan perkembangan anak. Penimbangan yang

rutin dilakukan setiap bulannya bertujuan untuk mengetahui atau mengecek dini mengenai kurang gizi pada balita.

2. Pemberian makanan tambahan (PMT)

Pemberian intervensi gizi berupa PMT ini bertujuan untuk menanggulangi secara langsung masalah gizi yang terjadi pada golongan atau kelompok rentan gizi seperti balita dan anak-anak. Pengadaan PMT disesuaikan dengan ketersediaan dana dari program pemerintah maupun dengan swadana masyarakat. Dan pemberian bahan makanan untuk PMT dapat diperoleh dengan mengolah sendiri atau dengan membeli langsung makanan jadi.

3. Memberikan penyuluhan kesehatan balita

a) Pemanfaatan dan pemberian ASI Eksklusif

ASI Eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan dan minuman tambahan pada bayi berumur nol sampai enam bulan. Bahkan air putih tidak diberikan dalam tahap ASI Eksklusif ini. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (2001) menyatakan bahwa ASI Eksklusif selama 6 (enam) bulan pertama hidup bayi adalah yang terbaik.

b) Makanan pendamping ASI (MP-ASI)

MP-ASI adalah makanan atau minuman yang mengandung gizi diberikan kepada bayi atau anak untuk memenuhi kebutuhan gizi.

c) Informasi mengenai penyakit yang sering diderita balita, pertolongan Pertama pada kecelakaan (PPPK), dan pengobatan balita di rumah

Penyakit yang sering dijumpai pada anak-anak dan balita antara lain demam, diare, batuk dan muntah, selain itu anak-anak juga rentan cidera oleh karena itu obat-obatan yang wajib disediakan di rumah biasanya obat-obatan untuk mengatasi penyakit atau gangguan-gangguan tersebut.

d) Stimulasi tumbuh kembang

Kemampuan dan tumbuh kembang anak perlu dirangsang oleh orang tua agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan sesuai umurnya, berbagai macam stimulasi seperti stimulasi visual (penglihatan), verbal (bicara). Auditif (pendengaran), taktil (sentuhan) dan lain-lain yang dapat mengoptimalkan perkembangan anak. Pemberian stimulasi akan lebih efektif apabila memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak sesuai dengan tahap-tahap perkembangannya. (Soetjiningsih,2005)

Kegiatan posyandu yang dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi setempat, pelayanan kesehatan di posyandu balita ini meliputi pemeriksaan kesehatan, pemberian vitamin, pemberian makanan tambahan (PMT) dengan memperhatikan kesehatan dan gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesehatan pada balita.

2.5.6 Kendala-kendala dalam pelaksanaan posyandu

Dalam pelaksanaannya, posyandu banyak mengalami kendala dan kegagalan walaupun ada juga yang berhasil. Kegagalan dan kendala tersebut Menurut Ismawati (2010:16) disebabkan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kader
2. Banyak terjadi angka putus (drop-out) kader.

3. Kepasifan dari pengurus posyandu karena belum adanya pembentukan atau reshuffle pengurus baru.
4. Keterampilan pengisian Kartu Menuju Sehat (KMS).
5. Pelaksanaan kegiatan posyandu tidak didukung dengan anggaran rutin.
6. Kurangnya kelengkapan untuk pelaksanaan KIE seperti buku-buku yang berkaitan dengan gizi dan kesehatan poster-poster, modul dan lainnya.
7. Kurangnya kelengkapan alat dan ukur dan timbangan.
8. Kemampuan kader posyandu dalam melakukan “konseling dan penyuluhan gizi sangat kurang sehingga aktifitas Pendidikan gizi menjadi macet. Akhirnya balita yang datang hanya ditimbang, dicatat kemudian jatah PMT dan pulang. Balita yang sudah mendapatkan imunisasi lengkap tidak mau lagi datang ke posyandu karena merasa tidak memperoleh manfaat apa-apa.
9. Dana operasional posyandu sangat menurun dan sarana operasional posyandu telah banyak yang rusak atau tak layak pakai.
10. Dukungan para stakeholder di tingkat daerah (Desa dan Kecamatan), LMS, Swasta dan organisasi dalam kegiatan posyandu belum bermakna sehingga belum dapat mengangkat kembali kegiatan posyandu.

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai kendala-kendala dalam pelaksanaan posyandu maka harus dilakukan revitalasi posyandu, dimana revitalasi posyandu ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu utama dalam pemantauan pertumbuhan balita.